



Konflik dalam Pendidikan Pesantren: Penolakan Wali Santri terhadap Sanksi atas Pelanggaran Peraturan

Muhammad Imam Fauzi¹, Ani Qutuz Zuhro' Fitriana², Irfan Dewa Saputra³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

masmuha.fauzy123@gmail.com, aniquotuz2402@gmail.com, irfandewasaputra225@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 12 , 2025

Revised July 14, 2025

Accepted July 16, 2025

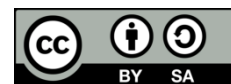
Keywords:

Conflicts, Islamic Boarding Schools, Sanctions,

ABSTRACT

This research aims to uncover the dynamics of conflicts that occur in the pesantren education environment, especially related to the rejection of the guardians of students to the sanctions given to their children for violations of pesantren rules. This study uses a qualitative approach with a case study method, focusing on the Hidayatul Muftadiin Islamic Boarding School, which is the location of the conflict between the caregiver and the guardian of three students, namely RFN, RHN, and RDI. Data was obtained through in-depth interviews with pesantren caregivers, field observations, and document analysis. The results of the study show that the conflict is triggered by differences in perception between the pesantren and the guardians of the students on the meaning and purpose of the sanctions applied. The pesantren considers sanctions as a form of moral development that is gradual and measurable, while the guardians of the students view it as a harsh and non-communicative action. The findings also show that there is a social influence of student seniority in shaping repetitive violating behavior. The researcher found that weak two-way communication and the absence of room for the participation of guardians of students in the coaching process also strengthened the conflict. This conflict indicates a structural imbalance between the values of the hierarchical pesantren authority and the expectations of a more participatory society. The implication of this study is the importance of updating communication patterns, collaborative coaching, and evaluation systems involving all stakeholders so that pesantren education remains relevant and adaptive to contemporary social dynamics.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 12 , 2025

Revised July 14, 2025

Accepted July 16, 2025

Keywords:

Konflik, Pesantren, Sanksi .

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika konflik yang terjadi dalam lingkungan pendidikan pesantren, khususnya terkait penolakan wali santri terhadap sanksi yang diberikan kepada anak-anak mereka atas pelanggaran tata tertib pesantren. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berfokus pada Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin, yang menjadi lokasi terjadinya konflik antara pihak pengasuh dan wali dari tiga santri, yakni RFN, RHN, dan RDI. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengasuh pesantren, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh perbedaan persepsi antara pesantren dan wali santri terhadap makna dan tujuan dari sanksi yang diterapkan.



Pihak pesantren menilai sanksi sebagai bentuk pembinaan moral yang bertahap dan terukur, sementara wali santri memandangnya sebagai tindakan yang keras dan tidak komunikatif. Temuan juga menunjukkan adanya pengaruh sosial dari senioritas santri dalam membentuk perilaku pelanggaran yang berulang. Peneliti menemukan bahwa lemahnya komunikasi dua arah dan tidak adanya ruang partisipasi wali santri dalam proses pembinaan turut memperkuat konflik tersebut. Konflik ini mengindikasikan adanya ketimpangan struktural antara nilai-nilai otoritas pesantren yang bersifat hierarkis dengan ekspektasi masyarakat yang lebih partisipatif. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pembaruan pola komunikasi, pembinaan kolaboratif, serta sistem evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan agar pendidikan pesantren tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Imam Fauzi
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
masmuha.fauzy123@gmail.com

Pendahuluan

Lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik secara utuh, tidak hanya dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam ranah spiritual, moral, dan sosial. Pesantren sebagai sistem pendidikan tradisional Islam telah lama menjadi pilar penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Namun, dalam praktiknya, proses pendidikan di pesantren tidak lepas dari tantangan, termasuk dalam hal pengendalian perilaku santri. Permasalahan kedisiplinan yang muncul di lingkungan pesantren seringkali berkaitan erat dengan dinamika psikososial santri, pengaruh lingkungan sebaya, serta hubungan antara pihak pesantren dan orang tua santri (Alfari & Hidayat, 2023). Hal ini menjadi isu yang krusial untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks pembinaan perilaku santri yang menyimpang dari norma dan tata tertib pesantren.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memegang peran sentral dalam membentuk karakter dan kepribadian generasi muda muslim. Fungsi utama pesantren tidak hanya terletak pada transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga pada proses internalisasi nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari santri (Farhan & Hadisaputra, 2021). Sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama, pesantren mengembangkan sistem pembinaan menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan penekanan pada kedisiplinan dan keteladanan. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan di pesantren tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu dinamika yang kerap muncul dan membutuhkan perhatian serius adalah terjadinya konflik, baik di antara santri, antara santri dan pengasuh, maupun antara pihak pesantren dengan



orang tua santri. Konflik ini, apabila tidak dikelola dengan tepat, dapat berdampak negatif terhadap proses pembelajaran, pembinaan karakter, dan hubungan sosial di dalam pesantren.

Salah satu studi kasus yang mencerminkan dinamika tersebut terjadi di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin, di mana tercatat sejumlah santri yang berulang kali melakukan pelanggaran terhadap peraturan pesantren. Fenomena ini mencerminkan pentingnya pengaruh kelompok sebaya dalam pembentukan perilaku remaja, sebagaimana diteorikan dalam pendekatan psikologi sosial, di mana tekanan konformitas dalam kelompok sering kali dapat menekan nilai-nilai pribadi atau aturan institusional yang berlaku. Perilaku menyimpang yang ditampilkan dapat dipahami sebagai bentuk proses sosialisasi negatif dalam lingkungan mikro yang gagal dikendalikan secara efektif oleh sistem pengawasan internal pesantren. Dalam konteks psikologi perkembangan anak dan remaja, keterlibatan orang tua dalam pembentukan perilaku anak memiliki peran sentral. Namun, ketika keterlibatan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam lingkungan pendidikan, maka kolaborasi yang diharapkan berubah menjadi sumber konflik. Resistensi orang tua terhadap upaya pembinaan yang dilakukan pihak pesantren menunjukkan adanya celah dalam komunikasi dan pemahaman bersama mengenai tujuan pendidikan di lingkungan pesantren (Ash-Shiddiqy, 2020).

Konflik dalam konteks pendidikan pesantren umumnya bersumber dari perbedaan persepsi, nilai, dan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, misalnya, santri sebagai individu dalam masa perkembangan remaja sering menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh pencarian identitas diri, tekanan teman sebaya, dan kebutuhan akan penerimaan sosial. Ketika perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh pesantren, maka akan muncul respons korektif dari pihak pengasuh berupa teguran atau sanksi. Di sinilah sering kali timbul konflik, terutama apabila santri tidak memahami maksud pembinaan atau merasa diperlakukan tidak adil. Selain itu, faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, pola asuh, dan tingkat pemahaman orang tua terhadap sistem pendidikan pesantren juga turut memengaruhi dinamika konflik (Aisah & Ruswandi, 2020). Beberapa orang tua, misalnya, mungkin menganggap bahwa pesantren bertugas hanya mengajarkan ilmu agama, namun belum tentu memahami bahwa pembentukan disiplin dan karakter juga menjadi bagian integral dari pendidikan pesantren.

Ketika sistem pengasuhan di pesantren terlalu otoriter tanpa ruang dialog, hal ini dapat memperkuat resistensi santri dan memicu perilaku menyimpang sebagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, dari perspektif manajemen konflik dalam pendidikan, ketidakseimbangan komunikasi antara pesantren dan wali santri juga dapat memperkeruh situasi. Ketika orang tua tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembinaan atau kurang diberi ruang untuk memahami pendekatan yang diterapkan pesantren, maka potensi konflik semakin besar. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan komunikasi tripartit antara santri, pengasuh, dan orang tua guna menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan harmonis. Secara struktural, beberapa pesantren juga menghadapi tantangan dalam sistem pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam hal kapasitas pengasuh atau ustaz dalam menghadapi perilaku santri yang kompleks. Tidak semua pengasuh memiliki latar belakang psikologis atau pedagogis yang memadai, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung normatif dan represif, bukan edukatif dan reflektif. Padahal, dalam pendekatan psikologi humanistik, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya potensi diri santri melalui empati, pemahaman, dan komunikasi yang terbuka. Ketika konflik terjadi, idealnya harus didekati sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh, bukan hanya sebagai pelanggaran yang harus dihukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya transformasi paradigma pendidikan



pesantren dari pendekatan otoritatif menjadi pendekatan dialogis dan partisipatif, di mana perbedaan pandangan tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai proses pendewasaan yang konstruktif (Bashori, 2020).

Lebih jauh, kasus ini menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif antara pesantren sebagai institusi pendidikan dan orang tua sebagai figur otoritas utama dalam kehidupan anak. Harmonisasi antara nilai-nilai keluarga dan pesantren menjadi syarat mutlak dalam proses internalisasi nilai-nilai positif pada diri santri. Ketika terjadi disonansi antara norma yang diajarkan di pesantren dan sikap orang tua dalam merespons pelanggaran yang dilakukan anak, maka pembentukan karakter yang utuh akan mengalami gangguan. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pola interaksi antara santri, lingkungan pergaulan, sistem pembinaan di pesantren, dan persepsi orang tua terhadap disiplin. Analisis secara menyeluruh dilakukan terhadap kasus ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan karakter yang lebih efektif di lingkungan pesantren, sekaligus menawarkan model komunikasi yang lebih konstruktif antara lembaga pendidikan dan keluarga dalam mengatasi perilaku menyimpang pada remaja.

Dengan demikian, konflik dalam pendidikan pesantren bukan semata-mata masalah disiplin atau pelanggaran aturan, tetapi juga merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan antaraktor dalam proses pendidikan. Studi tentang konflik ini menjadi penting untuk dilakukan, tidak hanya dalam rangka memahami dinamika internal pesantren, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pengembangan model pendidikan karakter yang lebih adaptif, responsif, dan manusiawi. Melalui pendekatan psikologis yang komprehensif, pendidikan pesantren dapat diarahkan untuk tidak hanya mencetak santri yang taat secara spiritual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Penelitian terhadap konflik dalam konteks pendidikan pesantren diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan strategi resolusi konflik yang efektif dan berorientasi pada pembinaan jangka panjang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan grounded research, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika konflik antara pihak pesantren dan wali santri terkait penolakan terhadap sanksi yang diberikan atas pelanggaran tata tertib. Lokasi penelitian dipusatkan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, yang dipilih karena menjadi tempat terjadinya kasus aktual yang relevan dengan fokus studi, yaitu penolakan wali santri terhadap sanksi disipliner yang dijatuhkan kepada tiga santri RFN, RHN, dan RDI yang secara berulang melanggar aturan pesantren, dengan latar belakang pergaulan negatif antara senior dan junior. Sumber informasi dalam penelitian ini meliputi santri yang terlibat langsung dalam kasus sebagai informan utama; pengasuh dan pengurus pesantren seperti UA dan UI sebagai informan kunci; serta wali santri yang melakukan penolakan terhadap kebijakan pesantren sebagai pihak eksternal. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber teks seperti dokumen tata tertib, arsip internal, dan artikel daring terkait isu pendidikan pesantren. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik desk review terhadap dokumen resmi, observasi partisipatif terhadap interaksi keseharian santri dan pengurus, wawancara mendalam semi- terstruktur dengan semua aktor yang terlibat, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan tim pengasuh untuk memahami perspektif kolektif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data untuk mereduksi dan



memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik dan kutipan penting, serta verifikasi untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul. Analisis yang digunakan mencakup analisis isi untuk menafsirkan makna dalam wawancara dan dokumen, analisis wacana untuk mengkaji penggunaan bahasa dan konstruksi sosial dalam menyampaikan konflik, serta analisis interpretatif untuk memahami makna subjektif dari sikap wali santri maupun pengasuh dalam konteks relasi kuasa, nilai, dan ekspektasi pendidikan.

Hasil

Konflik dalam pendidikan pesantren yang dimaksud dalam sub-temuan ini secara operasional merujuk pada bentuk ketidaksepahaman, penolakan, dan ketegangan antara pihak pesantren dan wali santri, khususnya dalam konteks penerapan sanksi disipliner terhadap pelanggaran tata tertib. Dalam konteks Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, konflik ini dimanifestasikan dalam bentuk keberatan wali santri terhadap keputusan pengasuh yang memberikan sanksi kepada anak-anak, meskipun pelanggaran yang dilakukan tergolong berulang dan telah melalui tahapan pembinaan sebelumnya. Fokus kasus dalam penelitian ini tertuju pada tiga santri, yakni RFN, RHN, dan RDI, di mana RFN yang merupakan santri junior terpengaruh secara perilaku oleh pergaulan dengan dua santri senior, RHN dan RDI, yang dikenal kerap melanggar aturan. Penolakan wali santri muncul setelah ketiga anak tersebut dikenai sanksi pembinaan intensif, yang dinilai orang tua sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak komunikatif. Sanksi tersebut justru memicu orang tua mendatangi langsung pengurus pesantren, dalam hal ini Ustaz UA dan Ustaz UH, untuk memprotes keputusan yang diambil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren, UH menjelaskan:

“... kami sudah berulang kali memberikan peringatan kepada RHN dan RDI, bahkan melalui pendekatan pribadi. Namun mereka tetap melanggar, dan lebih parahnya mereka menarik adik kelasnya, RFN, ikut melanggar juga. Sanksi itu kami ambil sebagai langkah terakhir, bukan karena benci tapi karena sayang.” (UH_01)

Hal senada disampaikan oleh pengasuh kedua, yaitu UA yang menyatakan:

“... wali santri seharusnya paham bahwa kami tidak serta merta menghukum, tapi sudah melalui tahapan. Sayangnya, banyak wali santri yang hanya melihat dari sisi anaknya tanpa mempertimbangkan keselamatan moral anak-anak lainnya.” (UA_01)

Pernyataan dari kedua informan ini menunjukkan adanya kesenjangan persepsi antara niat pengasuhan di pesantren dengan interpretasi yang dibawa oleh pihak orang tua, yang merasa bahwa sanksi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau perlakuan keras terhadap anak. Sementara itu, hasil observasi yang dilakukan selama peneliti berada di lingkungan pesantren memperkuat data wawancara tersebut. Peneliti mengamati bahwa RFN cenderung mengikuti pola perilaku RHN dan RDI, termasuk dalam hal keluar dari barisan saat kegiatan, meninggalkan kajian tanpa izin, serta membawa alat komunikasi yang dilarang oleh peraturan pesantren. Dalam beberapa interaksi informal di antara para santri, tampak bahwa RHN dan RDI memiliki pengaruh dominan di kelompoknya dan sering menunjukkan sikap menantang aturan, yang ditanggapi RFN dengan mengikuti secara loyal. Saat pengasuh memberikan teguran, RHN dan RDI tampak menunjukkan resistensi pasif, seperti diam namun tidak melaksanakan perintah, sedangkan RFN menunjukkan kebingungan emosional karena berada di posisi subordinat dalam kelompok pertemanannya.



Berdasarkan data hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menafsirkan bahwa konflik ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi dan ekspektasi antara pesantren dan orang tua. Sanksi yang dimaksudkan sebagai bagian dari sistem pembinaan dipersepsikan oleh wali santri sebagai hukuman yang mencederai martabat anak. Sementara itu, pihak pesantren merasa telah menjalankan fungsi pendidikan sesuai nilai dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini, posisi RFN sebagai santri yang masih berada dalam tahap penyesuaian menjadi rentan terhadap pengaruh lingkungan, sementara RHN dan RDI memainkan peran sebagai figur senior yang memberi pengaruh negatif, namun masih mendapat pembelaan kuat dari orang tua mereka. Ketidakhadiran komunikasi yang terbuka antara pesantren dan wali santri membuat proses pembinaan menjadi terganggu.

Berdasarkan pola yang terbaca dari temuan di atas, konflik semacam ini bukanlah kasus yang bersifat insidental atau personal, melainkan mengindikasikan adanya pola sistemik dalam dinamika hubungan antara pesantren dan wali santri.

Pola tersebut meliputi: (1) lemahnya komunikasi dua arah antara pesantren dan orang tua santri, (2) perbedaan pemahaman mengenai makna dan tujuan dari sanksi pendidikan, serta (3) pengaruh senioritas yang tidak terkontrol dalam lingkungan pesantren. Ketiga aspek ini membentuk pola konflik yang berulang, di mana pihak pengasuh berupaya menjalankan otoritas pedagogisnya, namun terhambat oleh resistensi eksternal dari pihak keluarga yang tidak mendapatkan cukup pemahaman atau keterlibatan dalam proses disipliner. Dengan demikian, temuan ini mengarah pada perlunya sistem komunikasi yang lebih partisipatif serta mekanisme pembinaan yang tidak hanya melibatkan santri, tetapi juga wali santri sebagai mitra edukatif.

Pembahasan

Penolakan wali santri terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak pesantren bukan semata disebabkan oleh ketidakterimaan terhadap aturan, melainkan juga karena adanya perbedaan pemahaman tentang tujuan sanksi dalam sistem pendidikan pesantren. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa konflik pendidikan di pesantren seringkali bersumber dari ketidaksepahaman antara nilai-nilai otoritas pesantren dan harapan wali santri yang lebih berorientasi pada kenyamanan anak (Salsabila et al., 2025). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa mekanisme komunikasi satu arah dari pihak pesantren turut memperkuat resistensi wali santri, sebagaimana komunikasi edukatif dalam pendidikan Islam (Wahono et al., 2021). Namun, berbeda dari beberapa studi sebelumnya yang lebih menyoroti peran figur otoritas dalam pesantren sebagai pemadam konflik, temuan dalam studi ini justru menunjukkan bahwa resistensi wali santri dapat bertambah kuat ketika figur otoritas pesantren tidak membuka ruang dialog secara aktif. Ini menunjukkan pentingnya transformasi pendekatan pembinaan di pesantren dari model otoriter ke model kolaboratif.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan adanya fungsi ganda dari mekanisme disiplin di pesantren yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, sanksi berfungsi sebagai instrumen pembinaan moral dan kedisiplinan; di sisi lain, ketika diterapkan tanpa komunikasi yang efektif, ia justru dapat menjadi sumber disfungsi sosial berupa konflik terbuka antara pengasuh dan wali santri. Situasi ini diperburuk oleh adanya struktur hubungan senior-junior yang tidak sepenuhnya dikendalikan, sehingga menciptakan mata rantai pelanggaran yang diturunkan dari santri senior ke santri junior, seperti terlihat pada kasus RFN yang terpengaruh perilaku RHN dan RDI. Pola ini mencerminkan adanya struktur sosial internal di pesantren yang dapat berfungsi sebagai arena formasi karakter, namun juga berpotensi menjadi medium penyebaran



perilaku negatif jika tidak dikelola secara ketat. Dengan kata lain, fungsi sosial pesantren sebagai agen pembinaan bisa menjadi disfungsi ketika struktur kontrol internal dan eksternal tidak seimbang.

Lebih jauh, temuan ini dapat dipahami sebagai hasil dari ketimpangan struktural dalam relasi pesantren-wali santri. Pesantren sebagai institusi tradisional memiliki struktur otoritas yang hierarkis dan tertutup, sedangkan wali santri sebagai bagian dari masyarakat modern cenderung membawa nilai-nilai partisipatif dan transparansi. Keduanya bekerja dalam kerangka nilai yang berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan konflik interpretasi terhadap tindakan disipliner. Dalam kerangka ini, konflik yang terjadi bukan semata karena sanksi itu sendiri, melainkan karena struktur makna yang berbeda antara pihak pesantren dan orang tua santri. Konflik sering kali terjadi karena adanya perbedaan sistem nilai dalam suatu struktur sosial yang kompleks (Hilmawan, 2020). Oleh karena itu, pesantren perlu membangun sistem komunikasi dan kolaborasi yang mampu menjembatani dua nilai tersebut agar proses pembinaan tidak hanya efektif secara internal, tetapi juga diterima secara eksternal.

Reposisi peran wali santri dalam sistem pendidikan pesantren, dari pihak luar menjadi mitra strategis dalam pembinaan anak. Pesantren yang tetap mempertahankan pola komunikasi satu arah cenderung mengalami resistensi yang berulang, yang dapat melemahkan otoritas pesantren di mata masyarakat. Oleh karena itu, penguatan struktur relasi melalui forum komunikasi terbuka, evaluasi bersama antara wali dan pengasuh, serta transparansi dalam proses pembinaan menjadi kebutuhan yang mendesak. Bila tidak direspons, konflik serupa dapat menjadi pola berulang yang tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga merusak citra pesantren sebagai lembaga pembinaan akhlak. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan pesantren tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan internal, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun harmoni struktural dan kultural dengan komunitas eksternalnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik dalam pendidikan pesantren yang ditinjau dari kasus penolakan wali santri terhadap sanksi atas pelanggaran peraturan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, dapat disimpulkan bahwa konflik tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pelanggaran tata tertib oleh santri, melainkan lebih kompleks karena melibatkan aspek komunikasi, struktur otoritas, serta perbedaan sistem nilai antara pengasuh dan wali santri. Penolakan wali terhadap sanksi muncul sebagai bentuk ketidaksepahaman atas maksud dan tujuan pembinaan yang dilakukan pihak pesantren. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga santri yang menjadi fokus kasus, yaitu RFN, RHN, dan RDI, merupakan bagian dari dinamika sosial internal pesantren, di mana pengaruh senioritas dan kurangnya pengawasan yang sistematis turut berkontribusi terhadap pelanggaran yang terjadi secara berulang. Dalam konteks ini, pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan otoritas internal dengan ekspektasi eksternal dari orang tua santri, yang menginginkan keterlibatan lebih besar dalam proses pembinaan anak.

Keberhasilan sistem disiplin dalam pendidikan pesantren tidak cukup hanya ditopang oleh kekuatan aturan dan otoritas pengasuh, tetapi juga harus ditunjang oleh komunikasi partisipatif, pemahaman bersama, dan pelibatan aktif wali santri sebagai mitra strategis dalam proses pendidikan. Konflik seperti yang terjadi dalam kasus ini mencerminkan kebutuhan untuk merancang ulang model relasi antara pesantren dan komunitas eksternal agar tidak hanya mengandalkan struktur hierarkis, tetapi juga membuka ruang dialog dan kolaborasi. Implikasi



dari temuan ini mengarah pada pentingnya penyusunan kebijakan internal yang adaptif terhadap dinamika sosial modern, serta penguatan kapasitas pengasuh dalam menjembatani nilai-nilai pendidikan tradisional dengan pendekatan pedagogis yang inklusif. Jika tidak ditangani secara sistematis, konflik semacam ini tidak hanya akan mengganggu proses pendidikan di lingkungan pesantren, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren sebagai institusi yang dipercaya untuk membina moral dan karakter generasi muda.

Daftar Pustaka

- Aisah, H., & Ruswandi, U. (2020). Bimbingan dan konseling multikultural di lembaga pendidikan pesantren pada generasi Z. *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 8(2), 511–523. <https://doi.org/10.36841/pgsdunars.v8i2.869>
- Alfari, D. D., & Hidayat, W. (2023). Strategi mitigasi risiko konflik sosial dalam pendidikan Islam di pesantren. *Studia Manageria*, 5(1), 43–52. <https://doi.org/10.19109/studiamanageria.v5i1.18191>
- Ash-Shiddiqy, M. (2020). Kerukunan dan resolusi konflik dalam tradisi pesantren (Studi kasus Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta). *Jurnal Tamaddun*, 8(1). <https://doi.org/10.24090/tamaddun.v8i1.3472>
- Bashori, B. (2020). Resolusi manajemen konflik (Kajian manajemen konflik di lembaga pendidikan Islam). *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan Sosial Budaya*, 4(2). <https://doi.org/10.31597/cc.v4i2.318>
- Farhan, L. P., & Hadisaputra, P. (2021). Conflict management in pesantren, madrasah, and Islamic colleges in Indonesia: A literature review. *Dialog*, 44(1), 37–50. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.445>
- Hilmawan, T. (2020). Strategi dan advokasi pondok pesantren dalam menyelesaikan masalah konflik sosial (Studi analisis Pondok Pesantren Al-Ittihad Jabung Lampung Timur). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 150–167. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2165>
- Salsabila, D., Firmansyah, F., Aisyah, P., Hawiww, S., Bela, S., & Mu'alimin, M. (2025). Strategi manajemen konflik dalam proses adaptasi santri baru di Pondok Pesantren Ra'iyatul Husnan Wringin Bondowoso. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 243–253. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.893>
- Wahono, M., Maftuh, B., & Malihah, E. (2021). Pendidikan resolusi konflik berbasis pesantren. *Untirta Civic Education Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.30870/ucej.v6i1.11353>